

RINGKASAN

Penelitian ini menganalisis implementasi standar pelayanan minimal bidang pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Rawalo di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal di SMAN 1 Rawalo Kabupaten Banyumas.

Menurut Edward III, faktor-faktor yang menentukan implementasi suatu kebijakan adalah komunikasi, sumber daya manusia dan keuangan, disposisi dan birokrasi. Pada aspek komunikasi, beberapa usulan dari pihak SMAN 1 Rawalo diterima oleh pemerintah kabupaten, aspek sumber daya manusia, pihak sekolah masih kekurangan guru yang tersertifikasi, dan kebutuhan terhadap pembiayaan penyelenggaraan pendidikan sudah terpenuhi, aspek disposisi, pengawasan masih belum maksimal karena pemerintah kabupaten, dan aspek birokrasi, keberadaan Balai Pengendalian Pendidikan Menengah dan Khusus (BP2MK) menjadi jawaban atas hambatan secara struktural.

Hasil dari penelitian ini mendeskripsikan penerapan kebijakan standar pelayanan minimal pada jenjang pendidikan menengah pada SMAN 1 Rawalo di Kabupaten Banyumas. Standar pelayanan minimal memiliki indikator yang harus dicapai oleh SMAN 1 Rawalo. Terpenuhi indikator-indikator tersebut menjadi dasar dalam penilaian terhadap penerapan kebijakan pada bidang pendidikan menengah. SMAN 1 Rawalo hanya mampu mencapai 70% indikator. Selain itu, terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan tersebut. Kelemahan pada implementasi SPM Pendidikan Menengah di SMAN 1 Rawalo terletak pada problem sumberdaya manusia.

Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar pelayanan minimal pada SMAN 1 Rawalo belum mampu memenuhi seluruh indikator. Keberadaan BP2MK merupakan solusi atas perubahan kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah dari kabupaten ke provinsi.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah, 1) BP2MK harus mampu melaksanakan fungsi pengawasan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian mutu, 2) pemerintah menyediakan anggaran yang digunakan untuk meningkatkan kompetensi guru, dan 3) pihak SMAN 1 Rawalo juga harus aktif dalam koordinasi dengan pemerintah agar penerapan standar pelayanan minimal dapat terpenuhi.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Standar Pelayanan Minimum, Pendidikan Menengah, SMAN 1 Rawalo

SUMMARY

This research analyzes implementation of minimum service standard on education in State High School (*Sekolah Menengah Atas Negeri*, SMAN) 1 Rawalo in the Regency of Banyumas. This research uses qualitative method. It aims to comprehend and describe implementation of Minimum Service Standard in SMAN 1 Rawalo in the Regency of Banyumas.

According to Edward III, there are some factors that determinate implementation. Those factors are communication, human and finance resources, disposition and bureaucracy. For the communication aspect, some proposals from SMAN 1 Rawalo are accepted by Regency Government. For the human resource aspect the school is still lacked of certified teachers. Meanwhile, the necessity of education financing is fulfilled. For the disposition aspect, the supervision from the regency government has not been yet potential. Last, for bureaucracy aspect Middle and Special Education Control Center (*Balai Pengendalian Pendidikan Menengah dan Khusus*, BP2MK) solves the structural issues.

Result of this research describes implementation of minimum service standard on middle education level in SMAN 1 Rawalo in the Regency of Banyumas. The minimum service standard has several indicators that must be achieved. The achievement becomes the basis of assessment of policy implementation on middle education level. SMAN 1 Rawalo can only achieve 70% of the indicators. Besides, there are several factors that affect the policy implementation. The weakness of implementation of minimum service standard in SMAN 1 Rawalo is caused by human resources problem.

This research concludes the minimum service standard of SMAN 1 Rawalo has not accomplished all the indicators. The BP2MK is the solution for shift of authority of middle education from Regency to Province.

Recommendation of this research are : 1) BP2MK must be able to implement the supervision function, coordination, coaching, and controlling the quality. 2) The government must provide the budget for raising the teacher competency, and 3) The SMAN 1 Rawalo must be proactive in coordination with the government, so the implementation of minimum service standard could be fulfilled.

Keywords :Policy Implementation, Minimum Service Standard, High School, SMAN 1 Rawalo